

PERSEPSI TENTANG PROSES PEMILIHAN UMUM 2024

(Studi Fenomenologi Jurnalis di Kota Mataram)

Muhammad Jamiluddin Nur^{1)*}, Muhlis²⁾, Aurelius Rofinus Lolong Teluma³⁾, Nurmita⁴⁾, Lale Sekar Pratiwi Idaman⁵⁾

^{1,2,3,4,5)}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mataram, Indonesia

*Corresponding authors: jamilnur14@unram.ac.id

ABSTRAK

Jurnalis adalah profesi yang kerap menyaksikan pemilu di Indonesia dari jarak dekat: mengumpulkan data, memverifikasi, menulis, dan mempublikasikan rangkaian proses pemilihan. Namun riset tentang persepsi jurnalis terhadap pemilu masih terbatas dan biasanya menggunakan pendekatan institusional/perusahaan media. Studi ini bertujuan memotret persepsi jurnalis atas proses Pemilu 2024. Penelitian memakai metode fenomenologi, menggali data dari pengalaman peliputan pemilu melalui wawancara mendalam. Pendekatan ini menangkap makna yang terbentuk dari interaksi mereka dengan penyelenggara, aktor politik, dan publik sepanjang liputan. Informan dipilih secara purposive: enam jurnalis peliput isu politik di Kota Mataram dari enam media berbeda. Temuan menunjukkan kecenderungan persepsi negatif terhadap sejumlah tahapan, seperti pencalonan presiden-wakil presiden, verifikasi daftar pemilih, masa tenang, hingga rekapitulasi suara. Para jurnalis menilai proses pemilu masih tersentralisasi; seleksi kandidat dipahami sebagai pertarungan ekonomi ketimbang adu gagasan; dan masa tenang dipersepsikan kacau. Hasil ini memberi potret kritis lokal tentang kualitas prosedural, akuntabilitas, dan transparansi pemilu. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan pengalaman individual jurnalis lokal yang mengikuti hampir seluruh tahapan pemilu, berbeda dari studi terdahulu yang lebih menyoroti isi pemberitaan, peran normatif jurnalis, atau relasi media dengan elite politik.

Kata Kunci: jurnalis, persepsi, fenomenologi, pemilu.

ABSTRACT

Journalists often observe Indonesia's elections at close range in real time: gathering data, verifying facts, writing, and publishing accounts of the process. Yet research on journalists' perceptions of elections remains limited and is usually framed through institutional or media-company perspectives. This study explores how journalists perceived the 2024 general election. Using a phenomenological design, it captured meanings drawn from reporters' lived experiences of covering the election. Data were generated through in-depth interviews and thematic interpretation of their narratives. Informants were selected purposively: six political reporters in Mataram City from six different media outlets. Findings show a tendency toward negative perceptions of key stages, including presidential–vice presidential nominations, voter-list verification, the cooling-off period, and vote recapitulation. Journalists described the process as still centralized, viewed candidate selection as an economic contest rather than an ideas-driven one, and characterized the cooling-off period as chaotic. The study's novelty lies in centering local journalists' individual experiences across nearly all election stages, contrasting with prior work that emphasizes news content, normative journalistic roles, or media–elite relations.

Keywords: journalist, perception, phenomenology, elections.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan pemilu kedelapan yang dilaksanakan di Indonesia sejak 1995. Menjelang pemilu ini, berbagai pandangan muncul dalam diskusi publik, seperti potensi penyalahgunaan wewenang, politik dinasti, polarisasi, serta penyebaran misinformasi dan disinformasi (BBC News Indonesia, 5 Desember 2023). Analisis *text mining* oleh Universitas Teknokrat Indonesia (Auliya Rahman Isnain, Maret 2023) menunjukkan beragam sentimen masyarakat terhadap pemilu 2024, dengan ketidakpercayaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kekhawatiran terhadap potensi konflik sosial.

Persepsi jurnalis terhadap pemilu sangat penting karena mencerminkan penilaian mereka terhadap proses pemilu, yang didasarkan pada pengalaman mereka di pemilu sebelumnya terutama ketika liputan. Selama ini, partisipasi publik, termasuk jurnalis hanya diukur melalui *voter turnout* (VTO) yang tidak memperhitungkan partisipasi pada tahapan-tahapan lain seperti persiapan, rekapitulasi suara, dan evaluasi. Observasi peneliti menunjukkan bahwa partisipasi publik pada tahapan-tahapan tersebut masih rendah. Di sisi lain, jurnalis memiliki akses yang lebih luas untuk mengikuti hampir seluruh tahapan pemilu, sehingga mereka menjadi aktor yang berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Teori konstruktivisme dan konsep persepsi sangat relevan untuk menjelaskan penelitian ini. Teori ini menganggap bahwa fakta dan realitas sosial dibentuk melalui pengalaman individu. Dalam konteks penelitian ini, persepsi jurnalis terhadap proses pemilu dibentuk oleh pengalaman mereka dalam mengikuti tahapan-tahapan pemilu. Misalnya, bagaimana jurnalis menginterpretasikan proses pencalonan, pemutakhiran daftar pemilih, masa tenang, dan rekapitulasi suara. Selain itu, konsep perspesi menjadi penting untuk memahami bagaimana mereka menilai setiap tahapan pemilu berdasarkan informasi yang mereka terima dan pengalaman yang mereka alami. Ini mencakup evaluasi terhadap transparansi, keadilan, dan potensi bias dalam proses-proses tersebut.

Lalu, bagaimana jurnalis memaknai dan menilai proses pemilu?. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada pemberitaan politik atau pada peran normatif jurnalis, seperti penelitian oleh Vos & Wolfgang (2016) yang memfokuskan pada keragaman sudut pandang dalam pemberitaan politik, atau Berganza et al. (2017) yang meneliti persepsi jurnalis terhadap profesionalisme mereka. Berbeda dengan studi sebelumnya yang menekankan isi pemberitaan, penelitian ini fokus pada pengalaman prosesual jurnalis dalam mengikuti tahapan pemilu.

Dengan demikian, rumusan masalah yang diajukan, yaitu *Bagaimana persepsi jurnalis tentang proses pemilu 2024 berdasarkan pengalaman liputan mereka*. Jurnalis, sebagai profesi yang terlibat langsung dalam proses pemilu, mengonstruksi makna dan melakukan penilaian mereka berdasarkan pengalaman langsung mereka. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi jurnalis terhadap proses Pemilu 2024 di Kota Mataram melalui pendekatan fenomenologi.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Konstruktivisme

Teori Konstruktivisme merupakan salah satu teori yang menjelaskan bagaimana individu membangun realitas sosial melalui pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang objektif dan tetap, melainkan hasil dari interpretasi dan konstruksi sosial yang dibentuk oleh individu. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, konstruktivisme digunakan untuk memahami bagaimana jurnalis membentuk persepsi mereka terhadap proses pemilu berdasarkan pengalaman mereka dalam meliput.

Menurut Flick et al. (2022), konstruktivisme berfokus pada bagaimana individu mengonseptualisasi dunia sosial berdasarkan pengalaman mereka. Realitas sosial, dalam hal ini adalah proses pemilu, tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang dapat diukur secara objektif oleh semua orang dengan cara yang sama. Sebaliknya, persepsi terhadap pemilu dibentuk oleh pengalaman unik yang dimiliki oleh setiap jurnalis. Setiap jurnalis mengonseptualisasi dan

menginterpretasikan tahapan pemilu yang mereka liput sesuai dengan latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman mereka.

Konsep Persepsi dalam Komunikasi

Persepsi, menurut Rahmat (2011), adalah proses ketika individu mengolah stimulus yang diterima dan mengubahnya menjadi informasi yang bermakna. Dalam konteks penelitian ini, persepsi jurnalis terhadap proses pemilu menjadi penting karena melalui persepsi inilah mereka membentuk narasi yang akan disampaikan kepada publik. Persepsi jurnalis ini tidak hanya bergantung pada fakta-fakta yang mereka temui, tetapi juga pada bagaimana mereka menginterpretasikan fakta-fakta tersebut melalui pengalaman dan kerangka pengetahuan yang mereka miliki.

Konstruktivisme berhubungan erat dengan persepsi, karena kedua konsep ini berkaitan dengan bagaimana individu (dalam hal ini, jurnalis) membentuk pandangan mereka terhadap dunia sosial. Persepsi jurnalis terhadap proses pemilu 2024 akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengalami, menilai, dan memberikan makna terhadap setiap tahapan pemilu yang mereka liput. Misalnya, proses pencalonan, pemutakhiran daftar pemilih, masa tenang, dan rekapitulasi suara akan dilihat secara berbeda oleh jurnalis yang memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda.

Penelitian ini mengadopsi teori konstruktivisme untuk menganalisis bagaimana jurnalis memaknai dan membentuk persepsi mereka terhadap berbagai tahapan pemilu, serta bagaimana persepsi ini membentuk narasi yang mereka buat dalam pemberitaan. Persepsi jurnalis ini tidak hanya berkaitan dengan fakta yang ada, tetapi juga dengan nilai, keyakinan, dan interpretasi mereka terhadap fakta-fakta tersebut.

Penelitian Terdahulu tentang Jurnalis dan Pemilu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji peran jurnalis dalam pemberitaan politik dan pemilu, namun sedikit yang meneliti bagaimana jurnalis membentuk persepsinya terhadap proses pemilu. Vos & Wolfgang (2016) mengkaji konstruksi normatif jurnalis terhadap keragaman sudut pandang dalam pemberitaan politik. Mereka menyimpulkan bahwa jurnalis memiliki pandangan

normatif tentang keragaman politik, meskipun dalam praktiknya mereka sering mengandalkan sumber-sumber elit yang mengurangi keragaman sudut pandang.

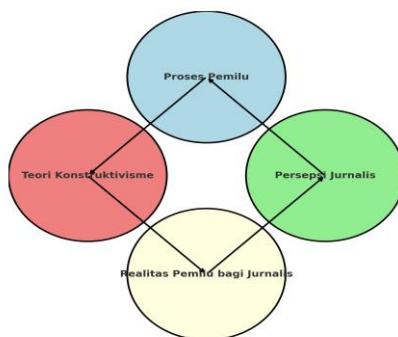
Berganza et al. (2017) meneliti persepsi jurnalis di Spanyol terhadap profesionalisme mereka dalam meliput isu politik. Hasil studi mereka menunjukkan bahwa jurnalis lebih banyak menganggap diri mereka sebagai wakil publik ketimbang sekadar menyampaikan informasi objektif. Penelitian ini menggambarkan bagaimana jurnalis menafsirkan dan memaknai peran mereka dalam demokrasi. Guttmann et al. (2022) meneliti hubungan antara pemenang pemilu dengan intensitas pemberitaan di negara-negara dengan sistem multipartai. Mereka menemukan bahwa pemenang pemilu cenderung mendapatkan eksposur media yang lebih besar, terutama di negara-negara dengan kebijakan sosio-kultural radikal.

Di Indonesia, penelitian Poentarie (2015) membandingkan kualitas pemberitaan Pemilu Presiden 2014 di dua media besar, yakni Kompas dan Koran Sindo. Penelitian ini menilai kualitas pemberitaan dalam hal kebenaran, relevansi, keseimbangan, dan netralitas. Sedangkan Alfira et al. (2023) meneliti bagaimana jurnalis di Malang Raya meliput isu politik dan menemukan adanya pengaruh yang kuat dari kepentingan perusahaan media, budaya lokal, serta faktor geografis terhadap cara jurnalis meliput politik. Namun, sebagian besar penelitian ini lebih menekankan pada pemberitaan dan peran normatif jurnalis, bukan pada pengalaman prosesual jurnalis dalam mengikuti tahapan pemilu. Penelitian ini berfokus pada gap tersebut, yaitu bagaimana persepsi jurnalis terhadap proses pemilu dibentuk oleh pengalaman mereka dalam meliput tahapan-tahapan pemilu yang berbeda.

Meskipun banyak penelitian yang membahas peran jurnalis dalam pemberitaan pemilu, sedikit yang meneliti bagaimana jurnalis membentuk persepsinya terhadap proses pemilu secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pencalonan, hingga rekapitulasi suara. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan mengkaji bagaimana persepsi jurnalis terhadap setiap tahapan pemilu mempengaruhi cara mereka meliput dan menyampaikan informasi kepada publik. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada produk pemberitaan (berita yang dihasilkan) dan peran jurnalis dalam proses demokrasi, sementara penelitian

ini lebih menekankan pada pengalaman prosesual jurnalis dalam mengikuti seluruh tahapan pemilu. Gap penelitian ini penting untuk dipahami karena persepsi jurnalis terhadap proses pemilu dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kualitas demokrasi yang dilaksanakan melalui pemilu.

Jika divisualisasikan, berikut adalah diagram konseptual yang menggambarkan hubungan antara fenomena pemilu, persepsi jurnalis, teori konstruktivisme, dan realitas pemilu bagi jurnalis.



Gambar 1. Visualisasi konseptual hubungan antara pengalaman liputan jurnalis, proses konstruksi makna (konstruktivisme dan persepsi), serta realitas pemilu 2024 yang mereka bangun dalam pemberitaan.

Sumber: Hasil Peneliti (2025)

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi. Fenomenologi dipilih karena fokusnya pada esensi pengalaman individu, yang sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk menggali dan memahami persepsi jurnalis secara mendalam terhadap proses Pemilu 2024. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna subjektif yang diberikan oleh jurnalis terhadap tahapan-tahapan pemilu yang mereka liput, berdasarkan pengalaman langsung mereka.

Metode fenomenologi dipilih karena sangat sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali persepsi jurnalis secara mendalam. Fenomenologi berfokus pada pengungkapan makna yang dibentuk individu berdasarkan pengalaman mereka. Dengan menggunakan fenomenologi, peneliti dapat

memahami esensi dari persepsi jurnalis terhadap tahapan pemilu, bukan hanya hasil pemberitaan yang mereka tulis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan lebih jelas mengenai persepsi mereka tentang pemilu.

Penelitian ini dilaksanakan dari Juni 2024 hingga Desember 2024. Rentang waktu ini dipilih guna memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengumpulkan data secara komprehensif, mengingat tahapan pemilu yang berlangsung dalam waktu yang panjang dan melibatkan berbagai fase, mulai dari persiapan hingga rekapitulasi suara. Sementara itu, kota Mataram dipilih karena menjadi episentrum politik di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, perusahaan media juga lebih banyak beroperasi di Mataram dibandingkan dengan lokasi lain.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan jurnalis yang terlibat langsung dalam peliputan Pemilu 2024. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman subjektif jurnalis dalam meliput berbagai tahapan pemilu. Setiap wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, dan persepsi mereka secara bebas dan mendalam. instrumen yang digunakan dalam proses ini adalah pedoman wawancara, perekam, dan buku catatan.

Informan dalam penelitian melibatkan 6 orang jurnalis yang bekerja di media yang berbeda-beda dan meliput Pemilu 2024 di wilayah Lombok. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria berikut: (1) Usia informan antara 23-40 tahun. (2) Bekerja di media massa yang telah terlibat dalam peliputan Pemilu 2024, yaitu:

Tabel 1: daftar informan

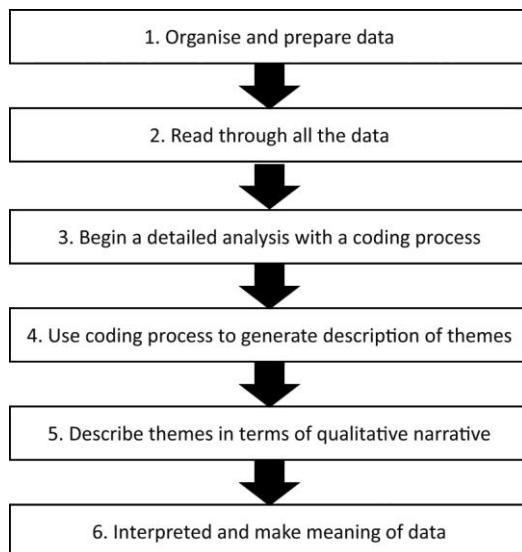
LombokPost	FH
NTBSatu	AH
Radar Lombok	AY
Tribunnews Lombok	RB
Pos Bali	FR
Antara News	IM

Sumber: diolah peneliti (2025)

Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman mereka dalam meliput seluruh tahapan pemilu, serta kemampuan mereka untuk

menggali pengalaman subjektif mereka. Selain itu, semua informan dalam penelitian ini juga bersedia terlibat tanpa paksaan. Peneliti menjamin semua kerahasiaan dan data pribadi informan.

Validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber. Selain dari wawancara mendalam, peneliti juga menggunakan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Sumber dari hasil penelitian yang diterbitkan jurnal menjadi pembanding data penelitian. Selain itu, pemberitaan yang berkaitan dengan proses pemilu 2024 dari berbagai tahapan juga menjadi data pembanding untuk menjaga validitas data penelitian ini.



Gambar 2: Prosedur analisis data Creswell

Sumber: Solms & Merwe (2020)

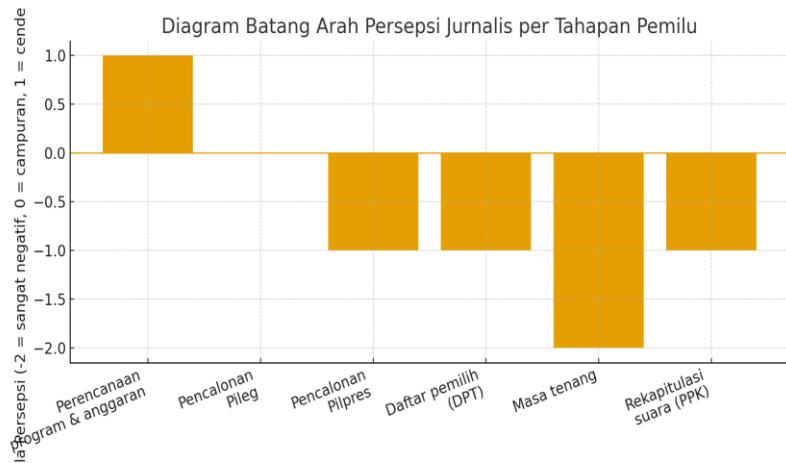
Secara singkat prosedur analisis data penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. (a) *Create and Organize File for Data*. Dalam tahap pertama ini, peneliti mengorganisir file data yang telah dikumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi. (b) *Read through Text, make margin notes*. Tahap ini peneliti membaca teks yang telah dihasilkan kemudian peneliti mencatat poin-poin penting yang peneliti identifikasi dari semua data yang ada. (c) *Describe the meaning of the experience for researcher*. Pada tahap analisis data ini peneliti menggambarkan makna pengalaman bagi peneliti setelah melakukan wawancara dan observasi. (d) *Find and list statement of meaning for individual*. (e) *Group statement into meaning unit*. Pada tahap ini peneliti

mencoba mengelompokkan makna yang diperoleh ke dalam beberapa unit. (f) *Develop the textural description “How” phenomenon was.* Pada tahap ini peneliti mengembangkan teks secara deskriptif tentang bagaimana fenomena yang terjadi dalam konteks persepsi jurnalis tentang industry media online. (g) *Develop overall description of the experience the “essence”.* Pada tahap ini peneliti mengembangkan secara keseluruhan deskripsi tentang pengalaman secara lebih rinci, dengan kata lain hal-hal yang paling esensial. (h) *Conclusion.* Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan setelah semua tahapan sebelumnya dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diagram Batang Arah Persepsi

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peneliti mencoba menggambarkan hasil penelitian melalui diagram batang arah persepsi jurnalis. Batang arah persepsi ini dibuat berdasarkan beberapa tahapan penting pemilu 2024. tahapan-tahapan tersebut seperti perencanaan, pencalonan pileg, pencalonan pilpres, daftar pemilih tetap, masa tenang, dan rekapitulasi suara. Diagram dibuat dengan penentuan skala persepsi: 1 = cenderung positif, 0 = campuran, -1 = negatif, -2 = sangat negatif seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Diagram batang arah persepsi jurnalis terhadap tahapan pemilu 2024 di kota Mataram. Skala persepsi: 1 = cenderung positif, 0 = campuran, -1 = negatif, -2 = sangat negatif.

sumber: Hasil Penelitian (2025)

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3, tahapan perencanaan program dan anggaran merupakan satu-satunya tahap yang dipersepsi relatif positif oleh jurnalis (skor 1), sedangkan pencalonan legislatif berada pada kategori campuran (skor 0). Tahapan-tahapan lain mulai dari pencalonan pilpres, penyusunan daftar pemilih (DPT), masa tenang, dan rekapitulasi suara secara konsisten memperoleh skor negatif hingga sangat negatif, dengan masa tenang menjadi fase yang dianggap paling bermasalah (skor -2). Pola ini mengindikasikan bahwa konstruksi realitas pemilu di mata jurnalis cenderung memburuk pada tahapan-tahapan hilir, ketika praktik di lapangan semakin jauh dari desain normatif yang diatur dalam regulasi.

Table 2. Ringkasan skor persepsi jurnalis pertahapan pemilu

Tahapan pemilu	Skor persepsi	Kategori (berdasarkan skala)
Perencanaan dan anggaran pemilu	1	Cenderung positif
Pencalonan Pileg	0	Campuran
Pencalonan Pilpres	-1	Negatif
DPT	-1	Negatif
Masa tenang	-2	Sangat Negatif
Rekapitulasi suara	-1	Negatif

Sumber: olahan peneliti (2025)

Karakter Sentralistik Perencanaan dan Anggaran Pemilu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis memaknai perencanaan program dan penganggaran Pemilu 2024 sebagai proses yang sangat sentralistik, namun sekaligus relatif transparan. Mereka melihat bahwa desain program dan anggaran “turun dari pusat”, disusun melalui PKPU dan pembahasan di DPR RI, kemudian diadopsi oleh penyelenggara pemilu di daerah.

Seorang jurnalis (IM) menggambarkan proses ini sebagai keterlibatan banyak aktor: *“Awalnya PKPU digodok di DPR RI, selanjutnya diturunkan ke daerah untuk dijalankan.”* Kutipan singkat ini menunjukkan bagaimana jurnalis mengonstruksi realitas perencanaan sebagai hasil negosiasi elite di pusat, bukan proses yang lahir dari kebutuhan spesifik daerah. Di sisi lain, mereka mengakui adanya ruang partisipasi, misalnya lewat rapat-rapat dengan stakeholder dan uji

publik PKPU, sehingga proses ini dinilai cukup transparan dan legitim secara prosedural.

Berdasarkan perspektif konstruktivisme, pengalaman berulang jurnalis menghadiri sosialisasi PKPU, konferensi pers KPU, dan rapat koordinasi membentuk skema kognitif bahwa perencanaan pemilu adalah domain pusat. Realitas ini bukan sekadar “diketahui”, tetapi dikonstruksi lewat interaksi mereka dengan dokumen, pejabat, dan rutinitas liputan. Persepsi tentang “sentralistik tetapi transparan” muncul dari kombinasi antara pengalaman empiris dan kerangka pengetahuan tentang sistem kepemiluan nasional (Flick dkk., 2022).

Keterbatasan peran media lokal menjadi temuan penting. Jurnalis memandang media lokal hanya sebagai pelaksana komunikasi program yang sudah jadi, bukan mitra strategis dalam merancang inovasi peningkatan partisipasi. Mereka menyoroti minimnya program yang benar-benar memanfaatkan kekuatan media lokal dan teknologi digital yang dekat dengan publik. Seorang informan (FH) menegaskan bahwa pemanfaatan platform digital masih bisa dimaksimalkan: *“Kalau bisa dimaksimalkan platform digital, mungkin partisipasi akan lebih tinggi.”*

Temuan ini sejalan dengan kajian Khairuddin dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa media lokal cenderung terikat pada kepentingan elit daerah dan struktur ekonomi-politik media, sehingga ruang otonomi mereka dalam merancang agenda publik terbatas. Jurnalis membaca keterbatasan ini sebagai “keterlibatan yang kurang bermakna”, meskipun secara formal mereka terlibat dalam sosialisasi. Temua ini sejalan dengan Rahmat, (2011) yang menjelaskan persepsi terbentuk melalui stimulus yang dialami manusia, salah satunya pengalaman.

Secara singkat, jurnalis mengonstruksi perencanaan dan anggaran Pemilu 2024 sebagai proses sentralistik namun prosedural-transparan, dengan ruang kreatif media lokal yang terbatas dan pemanfaatan teknologi digital yang belum optimal. Realitas ini dibentuk oleh pengalaman langsung mereka berinteraksi dengan desain kebijakan yang datang dari pusat dan praktik penyelenggara di daerah.

Pencalonan Pileg: Formalitas Mekanisme vs Kualitas Calon

Jurnalis urnalits memandang proses pencalonan berjalan relatif sesuai prosedur internal partai di kontestasi Pileg. Mereka mengakui bahwa partai memang pemilik otoritas rekrutmen calon wakil rakyat. Namun di balik persepsi formal yang “baik-baik saja”, jurnalis mengonstruksi narasi kritis terkait kualitas calon. Kondisi ini dapat dapat dijelaskan melalui konstruktivisme sebagai bentuk objektifikasi realitas institusional: otoritas rekrutmen dilekatkan pada partai lalu diterima sebagai “kenyataan yang wajar,” sehingga tampak tertib dan memiliki legitimasi secara prosedural (Knoblauch & Pfadenhauer, 2023; Wolfers, 2024). Konstruktivisme juga menekankan bahwa jurnalis memproduksi makna melalui pemilihan aspek yang disorot; karena itu, di balik *frame* formal “baik-baik saja,” jurnalis dapat membangun narasi tandingan dengan menilai *output* rekrutmen yakni kualitas kandidat melalui praktik *frame building* yang menonjolkan dimensi evaluatif (misalnya kompetensi, integritas, rekam jejak), sesuai perkembangan kajian framing di era digital (López-Rabadán, 2021; Geise & Xu, 2025).

Jika dilihat dari sisi persepsi, koeksistensi dua penilaian ini wajar karena jurnalis menggunakan skema *top-down* dan norma sosial saat menafsirkan situasi: kepatuhan prosedur memberi sinyal “normal/layak,” tetapi informasi tentang mutu kandidat memicu evaluasi substantif; persepsi juga dipengaruhi ekspektasi peran dan tekanan pemangku kepentingan, serta kecenderungan jurnalis memproyeksikan opini sendiri saat memperkirakan opini publik yang kemudian mendorong framing kritis tentang “kualitas calon” meski prosedurnya terlihat rapi (Dannals & Li, 2024; Banjac et al., 2024; Prochazka et al., 2025).

Sebagian informan (FH, AH, FR) menilai bahwa lemahnya kaderisasi partai membuat banyak calon maju bukan karena kapasitas intelektual dan visi politik, tetapi karena modal ekonomi dan popularitas. Seorang jurnalis (FH) menyatakan: “*Kalau kamu miskin, kamu tidak bisa daftar walaupun pintar.*” Kutipan ini merefleksikan konstruksi realitas bahwa kontestasi legislatif lebih tampak sebagai kompetisi sumber daya ekonomi, bukan kompetisi gagasan.

Jika dilihat dari teori konstruktivisme, pengalaman jurnalis meliput daftar calon tetap, menyimak manuver politik internal partai, dan berhadapan dengan figur-fiture selebritas atau pemilik modal, membentuk persepsi bahwa mekanisme

formal tidak selalu menjamin kualitas politik. Realitas “Pileg sebagai pertarungan modal” adalah hasil tafsir mereka terhadap pola yang berulang dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Temuan ini sejalan dengan pandangan Panji Suminar (dalam berita ANTARA) yang menyoroti fenomena maraknya artis dalam daftar calon sebagai indikasi lemahnya kaderisasi partai. Secara teoritis, hal ini bersinggungan dengan kajian Vos & Wolfgang (2016) maupun Berganza dkk. (2017) yang menunjukkan bahwa jurnalis sering memosisikan diri sebagai wakil publik yang menilai kualitas demokrasi, bukan sekadar pencatat prosedur. Dalam kasus ini, jurnalis di Mataram memaknai pencalonan legislatif sebagai proses yang sah secara prosedural, tetapi problematis bila dilihat dari kualitas representasi.

Jurnalis memersepsi pencalonan legislatif sebagai proses formal yang berjalan sesuai aturan, namun mereka mengonstruksi makna kritis bahwa kualitas calon banyak ditentukan oleh modal ekonomi dan popularitas, bukan kapasitas dan kaderisasi jangka panjang. Informan (FH) mislanya menegaskan, artis-artis yang mencalonkan diri sebagai calon legislative menunjukkan bukan kapasitas yang dipentingkan tetapi popularitas. Selain itu, lemahnya kaderisasi yang akuntabel juga menjadikan pemilik modal dengan mudah menjadi kader partai tertentu.

Pencalonan Pilpres: Permainan Konstitusi dan Nepotisme

Berbeda dengan pileg, persepsi jurnalis terhadap pencalonan pilpres, khususnya terkait majunya Gibran sebagai calon wakil presiden sangat negatif. Pengalaman mereka mengikuti dinamika perubahan syarat usia di Mahkamah Konstitusi (MK) membentuk konstruksi bahwa terjadi “permainan aturan” yang menguntungkan calon tertentu. Salah satu informan (FR) menyebut proses ini sebagai sesuatu yang “aneh”, ketika aturan diubah “di tengah jalan”. Jurnalis juga memaknai adanya nepotisme karena ketua MK saat itu memiliki hubungan kekerabatan dengan presiden sekaligus dengan calon yang diuntungkan. Jurnalis lain (AH) menilai kapasitas dan kematangan calon masih kurang untuk memimpin negara yang kompleks.

Persepsi negatif jurnalis terhadap pencalonan pilpres khususnya majunya Gibran sebagai cawapres dapat dibaca melalui konstruktivisme sebagai hasil konstruksi realitas yang dibentuk oleh pengalaman liputan atas proses perubahan

syarat usia di MK. Ketika jurnalis menyaksikan putusan yang membuka pengecualian usia (yang dalam narasi informan terasa “aneh” karena aturan seolah “diubah di tengah jalan”), pengalaman itu menjadi bahan utama untuk membingkai peristiwa sebagai “permainan aturan” yang menguntungkan kandidat tertentu (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023; Associated Press, 2023; Rohmah, 2024). Dalam kerangka konstruktivis, makna “permainan aturan” tidak hadir otomatis dari fakta hukum semata, tetapi diproduksi dan distabilkan lewat praktik komunikasi (diskusi redaksi, pemilihan istilah, penekanan konflik) sehingga membentuk narasi publik yang konsisten; proses ini sejalan dengan perkembangan kajian framing di lingkungan media hibrida, di mana konstruksi interpretasi politik makin dipengaruhi dinamika lintas-platform dan kompetisi makna (Knoblauch & Pfadenhauer, 2023; López-Rabadán, 2021).

Melalui konsep persepsi, penilaian “nepotisme” dan “kapasitas calon kurang” dapat dijelaskan sebagai proses seleksi interpretasi berbasis *skema* dan persepsi norma. Informasi tentang konflik kepentingan (ketua MK saat itu memiliki relasi kekerabatan dengan presiden dan kandidat yang diuntungkan, serta tidak mengundurkan diri dari penanganan perkara) menjadi isyarat kuat yang mendorong atribusi bahwa perubahan aturan tidak netral, sehingga memunculkan label “permainan” dan “nepotisme” (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023b; Reuters, 2023). Secara teoritis, persepsi norma menjelaskan mengapa “perubahan aturan mendadak” dibaca sebagai pelanggaran kewajaran prosedural yang memicu evaluasi moral; sementara kritik AH soal kematangan/kecakapan memimpin negara kompleks merefleksikan penilaian kompetensi berbasis skema kepemimpinan ideal (Dannals & Li, 2024).

Pada saat yang sama, penilaian jurnalis tidak berdiri di ruang hampa: ekspektasi peran (watchdog) dan tekanan ekspektasi pemangku kepentingan dapat mengarahkan jurnalis pada pembacaan yang lebih kritis (Banjac et al., 2024), dan riset terbaru menunjukkan persepsi jurnalis tentang opini publik juga bisa dipengaruhi *social projection* (pandangan pribadi ikut membentuk perkiraan “apa yang publik pikirkan”), yang kemudian menguatkan framing negatif terhadap proses dan kandidat (Prochazka et al., 2025). Secara keseluruhan, pada ranah pencalonan, jurnalis mengonstruksi pileg sebagai proses prosedural dengan

problem kualitas calon, sedangkan pilpres khususnya kasus Gibran dipersepsikan sebagai contoh permainan konstitusi dan nepotisme yang mengancam keadilan elektoral.

Persepsi Proses Penentuan Daftar Pemilih

Ketika tahapan penyusunan daftar pemilih, jurnalis menunjukkan persepsi yang konsisten negatif. Di satu sisi, mereka mengakui bahwa verifikasi data pemilih secara formal mengikuti ketentuan. Namun pengalaman lapangan menemukan nama pemilih yang sudah meninggal masih tercantum, alamat yang tidak sesuai, atau warga yang belum terdaftar membentuk konstruksi bahwa data pemilih selalu menjadi masalah berulang. Seorang informan (AY) menyebut maraknya “joki Pantarlih”, yaitu petugas pemutakhiran data yang tidak melakukan tugas langsung di lapangan, tetapi menyerahkannya kepada orang lain dan hanya menerima hasil. Jurnalis lain menilai persoalan juga bersumber dari lemahnya kualitas data kependudukan di Dukcapil, sehingga Pantarlih bekerja dengan basis data yang sejak awal sudah bermasalah.

Persepsi negatif jurnalis pada tahapan penyusunan daftar pemilih muncul karena mereka tidak hanya menilai kepatuhan formal (verifikasi mengikuti ketentuan). Mereka juga membangun makna dari pengalaman lapangan yang berulang: pemilih meninggal masih tercantum, alamat tidak sesuai, dan warga belum terdaftar. Ketidaksesuaian berulang ini kemudian dikonstruksi sebagai “masalah struktural” yang selalu hadir pada setiap pemilu, sebuah realitas sosial yang distabilkan melalui akumulasi temuan, pertukaran informasi antarsesama jurnalis, dan pembingkaian isu sebagai problem kronis.

Narasi “joki Pantarlih” memperkuat konstruksi tersebut karena ia menjadi simbol *decoupling* antara prosedur resmi dan praktik di lapangan (petugas tidak bekerja *door-to-door* tetapi menyerahkan pada orang lain), sehingga “formal sesuai aturan” tidak lagi dipahami sebagai jaminan kualitas data (Herlambang & Fauzi, 2024). Pada saat yang sama, penjelasan informan tentang lemahnya basis data Dukcapil membuat konstruksi jurnalis bergerak dari sekadar “kesalahan teknis Pantarlih” ke kritik sistemik. Pantarlih dipahami bekerja di atas fondasi data kependudukan (DP4) yang sejak awal tidak selalu akurat, sehingga problem daftar pemilih menjadi reproduksi kelemahan antarlembaga (Sejati, 2023).

Konsistensi negatif yang ditunjukkan ini dapat dijelaskan melalui mekanisme seleksi interpretasi berbasis *skema*. Temuan lapangan yang konkret dan mudah diverifikasi (misalnya pemilih meninggal masih masuk DPT) menjadi isyarat yang sangat menonjol, lalu memperkuat ekspektasi bahwa “data pemilih selalu bermasalah.” Ketika anomali semacam itu dijumpai berulang, persepsi cenderung mengeras menjadi penilaian stabil dan generalisasi, karena otak memprioritaskan bukti yang konsisten dengan pengalaman sebelumnya dan menganggapnya lebih representatif daripada klaim kepatuhan prosedur. Temuan formal Bawaslu tentang pemilih meninggal yang masih tercatat dalam DPT juga memberi legitimasi eksternal pada persepsi jurnalis, sehingga persepsi negatif tidak hanya berbasis opini, tetapi dipertebal oleh indikator pengawasan resmi (Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2024). Alhasil, jurnalis melakukan atribusi kausal ganda: aktor (praktik joki Pantarlih) dan struktur (kualitas data Dukcapil) dipahami saling mengunci, membuat masalah daftar pemilih tampil sebagai problem berulang yang terus terjadi dalam *skema* mereka (Herlambang & Fauzi, 2024; Sejati, 2023).

Masa Tenang: Ruang Strategi dan Politik Uang

Persepsi jurnalis tentang masa tenang sangat negatif dan sarat makna. Mereka tidak melihat masa tenang sebagai waktu hening, tetapi justru sebagai “masa paling ribut”. Seorang informan (FH) menegaskan: “*Masa tenang itu masa yang paling ribut, mulai dari bagi uang sampai bagi sembako.*” Kutipan singkat ini merangkum konstruksi bahwa aturan larangan kampanye tidak benar-benar mengubah praktik di lapangan. Pengalaman liputan menunjukkan bahwa alat peraga kampanye masih terpajang, pertemuan tatap muka tetap berlangsung, dan kampanye terus bergerak melalui media sosial dan aplikasi pesan. Jurnalis menilai bahwa Bawaslu memiliki keterbatasan baik regulasi maupun kapasitas untuk mengontrol aktivitas yang sifatnya tersebar dan digital. Masa tenang adalah ruang strategis yang disebut informan AY sebagai “serangan fajar” dan konsolidasi terakhir.

Makna “masa tenang” tidak dipahami jurnalis sebagai kategori hukum yang netral, melainkan sebagai realitas sosial yang dibentuk oleh pengalaman liputan dan praktik berulang di lapangan. Walau secara formal masa tenang adalah

periode ketika aktivitas kampanye dilarang (KPU RI, 2023). Pernyataan FH dan AY menunjukkan proses redefinisi makna: aturan larangan kampanye tidak dipersepsi mampu mengubah praktik, sehingga “tenang” dikonstruksi menjadi *ruang strategis* untuk “serangan fajar” dan konsolidasi terakhir. Konstruksi ini makin mengeras karena jurnalis membawa kerangka nilai “demokrasi bersih” dan pengetahuan historis atas pola pelanggaran yang berulang, sehingga masa tenang diposisikan sebagai simbol ketegangan antara prosedur formal dan praktik informal yang tersembunyi (Knoblauch & Pfadenhauer, 2023; KPU RI, 2023).

Penilaian negatif yang “saraf makna” dapat dijelaskan melalui persepsi norma: jurnalis masuk ke situasi dengan ekspektasi normatif masa tenang/jeda kampanye, lalu menghadapi informasi normatif yang kuat dari lapangan (indikasi pembagian uang/sembako), dan akhirnya mengintegrasikannya menjadi kesimpulan bahwa norma yang benar-benar bekerja justru “mobilisasi terselubung” (Dannals & Li, 2024). Karena praktik serangan fajar juga diakui sebagai kecenderungan pelanggaran yang perlu diawasi intensif pada masa tenang, melalui pemberitaan dan pernyataan pengawas pemilu, persepsi jurnalis mendapat penguatan eksternal: pengalaman personal dan sinyal kelembagaan sama-sama mengarahkan pada atribusi bahwa masa tenang bukan “hening,” melainkan puncak kompetisi yang bergeser dari kampanye terbuka ke transaksi dan operasi senyap (Antara, 2024; Dannals & Li, 2024).

Rekapitulasi Suara: Tahap Paling Rawan

Ketika rekapitulasi suara di tingkat PPK, jurnalis memerlukan adanya kerentanan serius terhadap kecurangan. Kotak suara yang mengendap dalam waktu relatif lama, proses penghitungan berlapis, serta ruang negosiasi antar saksi melahirkan konstruksi bahwa rekapitulasi bukan sekadar proses teknis, tetapi arena pertarungan kepentingan. Sebagian jurnalis (IM, FR,) misalnya menilai saling tuduh dan kecurigaan antarcalon sebagai “dinamika politik biasa”. Namun yang lain (AH, FH, AY, RB) memaknai fenomena migrasi suara dan perdebatan angka sebagai indikasi bahwa sistem belum sepenuhnya mampu menutup celah manipulasi. Pertanyaan reflektif yang muncul “kalau tidak ada kemungkinan kecurangan, mengapa suara harus dikawal?” ini menunjukkan bahwa jurnalis

memaknai pengawalan suara sebagai respons terhadap sistem yang tidak sepenuhnya dipercaya.

Pada tahap rekapitulasi suara di tingkat PPK, persepsi jurnalis tentang “kerentanan serius” dapat dijelaskan lewat konstruktivisme/*communicative constructivism*: realitas “rawan curang” tidak lahir semata dari prosedur teknis, melainkan dari praktik komunikasi dan interaksi yang mereka saksikan. Peristiwa seperti kotak suara mengendap, penghitungan berlapis, keberatan saksi, hingga ruang negosiasi yang kemudian dikonstruksi sebagai arena pertarungan kepentingan, bukan sekadar administrasi (Knoblauch & Pfadenhauer, 2023). Konstruksi itu juga mendapat penguatan dari wacana pengawasan pemilu yang menekankan adanya kerawanan pada tahapan pungut–hitung dan proses rekapitulasi berjenjang sehingga “kawal suara” menjadi praktik yang dianggap wajar sebagai mekanisme kontrol sosial (Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2024; Antara, 2024).

Sementara itu, perbedaan penilaian antarinforman sebagian menganggap saling tuduh sebagai “dinamika biasa,” sebagian lain membaca migrasi suara dan perdebatan angka sebagai celah manipulasi dapat dipahami melalui konsep persepsi norma: aktor masuk situasi dengan ekspektasi (rekap = prosedur penetapan), lalu menimbang “informasi norma” yang mereka lihat (mis. perdebatan angka, keberatan saksi, praktik pengawalan), dan mengintegrasikannya menjadi kesimpulan tentang norma yang sebenarnya berlaku (rekap = titik yang harus diawasi karena sistem belum sepenuhnya dipercaya) (Dannals & Li, 2024). Karena itu, pertanyaan reflektif “kalau tidak ada kemungkinan kecurangan, mengapa suara harus dikawal?” dapat dibaca sebagai indikator defisit trust. Pengawalan suara dimaknai sebagai respons rasional terhadap risiko yang dipersepsi tetapi ada dalam rekapitulasi, bukan sekadar rutinitas prosedural (Bawaslu, 2024; Antara, 2024).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi jurnalis terhadap Pemilu 2024 bersifat kritis, dengan penekanan pada sentralisasi perencanaan, lemahnya kualitas calon, praktik politik uang, dan kerentanan rekapitulasi suara. Hasil menunjukkan

bahwa persepsi jurnalis terhadap pemilu bersifat selektif dan tidak linier; realitas pemilu mereka bangun dari interaksi berulang dengan penyelenggara, peserta, regulasi, dan praktik lapangan di setiap tahapan pemilu.

Secara umum, hanya tahapan perencanaan program dan penganggaran yang dipersepsikan relatif positif: dinilai sentralistik tetapi cukup transparan dan prosedural. Sebaliknya, pencalonan legislatif dipahami sebagai kompetisi modal, bukan gagasan; pencalonan pilpres khususnya kasus Gibran dipersepsikan sebagai permainan konstitusi dan nepotisme; pemutakhiran dan penetapan DPT dilihat sebagai titik lemah struktural; sementara masa tenang dan rekapitulasi suara dianggap sebagai fase paling chaos dan rawan kecurangan. Dalam perspektif konstruktivisme, rangkaian pengalaman ini diolah menjadi skema makna tentang pemilu yang “sah secara prosedur, tetapi bermasalah di beberapa tahap kunci”.

Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa jurnalis bukan hanya perantara informasi, tetapi aktor yang aktif mengonstruksi makna kualitas demokrasi. Secara praktis, penelitian ini mengisyaratkan perlunya perbaikan serius pada akurasi DPT, pengawasan politik uang di masa tenang, serta transparansi rekapitulasi suara. Kepercayaan jurnalis (dan pada akhirnya publik) sangat bergantung pada konsistensi antara regulasi normatif dan praktik di lapangan.

Penelitian ini terbatas pada jumlah informan dan konteks satu kota, sehingga tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara nasional. Secara akademis, perlu ada studi komparatif antardaerah, analisis isi pemberitaan, atau hubungan persepsi jurnalis dengan persepsi publik. Diperlukan jug penelitian dengan jumlah informan yang lebih banyak dan lokus yang lebih luas. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan KPU untuk perbaikan regulasi dan metode pengawasan. KPU juga perlu melibatkan jurnalis dalam proses evaluasi sehingga mendapatkan masukan yang kontekstual dengan apa yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2024, November 27). *Awasi langsung pemungutan suara, Puadi dapat pemilih meninggal masuk DPT*.

- Alfira, N., Maudy Apsari, K. A., Gustomy, R., & Apriliyanti, S. A. (2023). Reporting politics: A political journalism study from the perspectives of journalists in Malang Raya. *Mediakita*, 7(2), 220–247. <https://doi.org/10.30762/mediakita.v7i2.871>
- Antara. (2024, February 15). *Bawaslu Kalsel waspadai kerawanan manipulasi suara saat rekapitulasi*.
- Antara. (2023, 3 Juni). *Parpol gaet artis jadi caleg tunjukkan kegagalan kaderisasi*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/3569682>
- Antara. (2024, November 9). *Bawaslu intensifkan pencegahan pelanggaran Pilkada saat masa tenang*.
- Associated Press. (2023, November 7). *Court panel removes Indonesia's chief justice for ethical breach that benefited president's son*.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2024, February 4). *Bawaslu ingatkan jajaran KPU daerah soal kerawanan saat pungut dan penghitungan suara*.
- Banjac, S., Juarez Miro, C., & Hanusch, F. (2024). Expectations of journalistic actors in the digital age: A conceptual framework. *Communication Theory*, 34(2), 60–70. <https://doi.org/10.1093/ct/qtae002>
- BBC News Indonesia. (2023, December 5). *Potensi penyalahgunaan wewenang dalam Pemilu 2024*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66531834>
- Berganza, R., Lavín, E., & Piñeiro-Naval, V. (2017). Spanish journalists' perception about their professional roles. *Comunicar: Media Education Research Journal*, 25(51), 83–92. <https://doi.org/10.3916/C51-2017-08>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dannals, J. E., & Li, Y. (2024). A theoretical framework for social norm perception. *Research in Organizational Behavior*, 44, 100211. <https://doi.org/10.1016/j.riob.2024.100211>
- Flick, U., Steinke, I., & von Kardoff, E. (2017). *Buku induk penelitian kualitatif: Paradigma, teori, metode, prosedur, dan praktik*. Cantrik Pustaka.
- Gattermann, K., Meyer, T. M., & Wurzer, K. (2022). Who won the election? Explaining news coverage of election results in multi-party systems.

- European Journal of Political Research*, 61(4), 857–877.
<https://doi.org/10.1111/1475-6765.12498>
- Geise, S., & Xu, Y. (2025). Effects of visual framing in multimodal media environments: A systematic review of studies between 1979 and 2023. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 102(3), 796–823.
<https://doi.org/10.1177/10776990241257586>
- Herlambang, M. R., & Fauzi, A. M. (2024). Fenomena joki Pantarlih pada persiapan Pemilu 2024 di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. *Paradigma*, 13(1), 41–50.
- Knoblauch, H., & Pfadenhauer, M. (2023). Construction versus realism? The unrealized potential of communicative constructivism. *Sociologica*, 17(1), 119–136. <https://doi.org/10.6092/issn.1971-8853/16725>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum*. JDIH KPU RI.
- López-Rabadán, P. (2021). Framing studies evolution in the social media era: Digital advancement and reorientation of the research agenda. *Social Sciences*, 11(1), 9. <https://doi.org/10.3390/socsci11010009>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023, October 16). *Presidential tickets at least 40 years old or elected officials* (Putusan No. 90/PUU-XXI/2023).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023, November 7). *Ethics Council removes Anwar Usman from Chief Justice position* (Putusan MKMK No. 02/MKMK/L/11/2023).
- Perdana, A., & Susanto, A. (2023). *Indeks partisipasi pemilu untuk pemilu 2024*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Poentarie, E. (2015). Komparasi kebenaran, relevansi, keseimbangan dan netralitas dalam pemberitaan (Studi konten analisis terkait pemberitaan Pemilu Presiden 2014 di Harian Kompas dan Koran Sindo). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 19(1), 1–13.

- Prochazka, F., Soontjens, K., Beckers, K., Hopmann, D. N., & Schuck, A. (2025). Projection in journalists' perceptions of public opinion. *Journalism*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/14648849251346198>.
- Rakhmat, J. (2011). *Psikologi komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Reuters. (2023, November 7). *Indonesian judge found guilty of ethical violations over ruling that allowed president's son run*.
- Rohmah, E. I. (2024). Dinamika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. *Progresif: Jurnal Hukum*.
- Sejati, S. B. (2023, April). *Polemik hasil pengawasan pencocokan dan penelitian daftar pemilih sementara Pemilu 2024* (Info Singkat, Vol. XV, No. 7/I/PAK/April/2023). Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
- Teknokrat.ac.id (2024, Maret 28). *Sentimen analisis masyarakat terhadap pemilu serentak 2024*.<https://teknokrat.ac.id/opini-sentimen-analisis-masyarakat-terhadap-pemilu-serentak-2024-ditwitter>
- Vos, T. P., & Wolfgang, J. D. (2016). Journalists' normative constructions of political viewpoint diversity. *Journalism Studies*, 19(6), 764–781.
- Wolfers, L. N. (2024). A social constructivist viewpoint of media effects: Extending the social influence model of technology use to media effects. *Communication Theory*, 34(4), 178–190. <https://doi.org/10.1093/ct/qtae015>
- Wolfgang, J. D., Vos, T. P., Kelling, K., & Shin, S. (2021). Political journalism and democracy: How journalists reflect political viewpoint diversity in their reporting. *Journalism Studies*, 22(10), 1339–1357.